

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KELEMBAGAAN DESA
(STUDI PADA KANTOR DESA PERPANDEN KECAMATAN
KUTALIMBARU)**

SKRIPSI

OLEH:

**VERNALIA CALESNA BR BARUS
NPM. 16.852.0026**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/20

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KELEMBAGAAN DESA
(STUDI PADA KANTOR DESA PERPANDEN KECAMATAN
KUTALIMBARU)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area*

Oleh:

VERNALIA CALESNA BR BARUS

NPM. 16.852.0026



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/20

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa
(Studi Pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan
Kutalimbaru)

Nama : Vernalia Calesna br Barus

NPM : 16.852.0026

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Beby Mashito BB, S.Sos, MAP

Pembimbing II



Nina Angelia, S.Sos, M.Si

Mengetahui:



Dekan Fakultas ISIPOL


Dr. Heri Kusmanto, MA

Ketua Program Studi


Nina Angelia, S.Sos, M.Si

Tanggal Lulus: 17 Maret 2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : VERNALIA CALESNA BR BARUS

NPM : 16.852.0026

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru)”** sebagai syarat memperoleh gelar sarjana adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 17 Maret 2020

Vernalia Calesna Br Barus

NPM. 16.852.0026

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VERNALIA CALESNA BR BARUS

NPM : 16.852.0026

Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Fakultas : ISIPOL

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

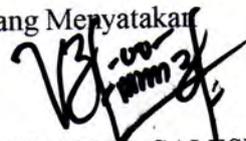
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Eksklusif (Non-exclusive Royalty-free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru)”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 17 Maret 2020

Yang Menyatakan



(VERNALIA CALESNA BR BARUS)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia (**Ayat Alkitab Ulangan 28:13**).
2. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu (**Ayat Alkitab Ulangan 5:16**).
3. *Live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever* (Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok dan belajarliah seolah-olah kamu harus hidup selamanya, **Mahatma Gandhi**).
4. *Start where you are, use what you have, do what you can* (Mulai dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa).

PERSEMBAHAN :

1. Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan dan mengabulkan doa yang saya panjatkan.
2. Teristimewa kedua orang tua saya Bapak Kalpin Barus dan Ibu Esterliana br Ginting yang selalu berusaha memenuhi dan memberikan yang terbaik kepada saya.
3. Terkasih kepada adik-adik saya, yaitu Inka Nora Audea br Barus, Rani Elfira br Barus, dan Donny Filemonta Barus yang selalu memberikan motivasi.
4. Terkhusus kepada keluarga besar saya yaitu keluarga Barus dan keluarga Ginting yang selalu memberikan semangat.
5. Sahabat karibku Anggi Dahliana Lubis, Alike Mutia Zahra, Aslihal Anwar Nst, Rizka Khairani Lubis, dan Sri Maharani yang selalu memberikan dukungan.
6. Kepada sobatku Melisa Theodora dan Dinda.
7. Kepada BPMR dan jemaat GBKP Runggun Berdikari Klasis Medan Kampung Lalang.
8. Kepada seluruh rekan-rekan Permata Glory GBKP Runggun Berdikari Klasis Medan Kampung Lalang.
9. Keluarga besar FISIPOL UMA.
10. Almamater Universitas Medan Area (UMA) yang saya banggakan.

ABSTRAK

Desa Perpanden merupakan salah satu desa di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Desa Perpanden memiliki kelembagaan desa yang melibatkan masyarakat desa untuk berperan serta dan berkontribusi di dalam lembaga desa tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru, karena tingkat partisipasi perempuan di Desa Perpanden masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru. Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut berperan dan bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpanden masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari peran, keterlibatan, serta keterwakilan perempuan dalam kepengurusan atau struktur fungsional di lembaga desa. Penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa yang dilakukan di Kantor Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan dengan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi data dan analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwasanya faktor penghambat peran dan tingkat partisipasi perempuan di Kantor Desa Perpanden masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor budaya, faktor keluarga, faktor dari diri perempuan sendiri, faktor sosialisasi atau pengarahan, dan faktor peran lokal. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpanden guna kemajuan kaum perempuan Desa Perpanden.

Kata Kunci : Partisipasi, Perempuan, Kelembagaan Desa

ABSTRACT

Perpanden Village is one of the villages in Kutalimbaru District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. Perpanden Village has a village institution which involves the village community to participate in and contribute to the village institution. The problem in this study is to describe women's participation in village institutions in the Perpanden Village Office, Kutalimbaru District, because the level of women's participation in Perpanden Village is still low. The purpose of this study was to analyze women's participation in village institutions in the Perpanden Village Office, Kutalimbaru District. Participation is the involvement of a person or group of people to play a role and be responsible in the community environment. In this study, women's participation in village institutions in the Perpanden Village Office was still low. This can be seen from the role, involvement and representation of women in management or functional structures in village institutions. Research on women's participation in village institutions conducted at the Perpanden Village Office in Kutalimbaru District is a research that uses qualitative methods. For data collection, researchers conducted by direct observation, interviews, and documentation. The data validity uses data triangulation and data analysis is carried out in several stages, namely data collection, data reduction, data presentation and then conclusions drawn from research result. From the results of research conducted, it is known that the inhibiting factors of the role and level of women's participation in the Perpanden Village Office are still low due to several factors including educational factors, cultural factors, family factors, factors of women themselves, socialization or direction factors, and role factors local. To catch up, the efforts must be made to increase the participation of women in village institutions in the Perpanden Village Office in order to advance the women of Perpanden Village.

Keywords: *Participation, Women, Village Institutions*

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pola Mulo pada tanggal 18 Desember 1997 dari ayah Kalpin Barus dan ibu Esterliana Br Ginting. Penulis merupakan putri pertama dari empat bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri (SDN)

Nomor 104225 di Desa Perpanden hingga selesai pada tahun 2009.

Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Kutalimbaru dan lulus pada tahun 2012.

Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Swasta Yayasan Perguruan Indonesia Membangun (YAPIM) Sei Gelugur dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Medan Area (UMA) dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Administrasi Publik.

Selama kuliah di kampus UMA penulis bergabung dan aktif dalam organisasi baik intra maupun ekstra kampus, yaitu :

1. Sekretaris Bidang Diskusi dan Penalaran di Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Periode 2018-2019.

2. Sekretaris Umum Permata GBKP (Gereja Batak Karo Protestan)
Perpulauan Berdikari Klasis Medan Kampung Lalang Periode
3. Bendahara Umum Team Verifikasi GBKP (Gereja Batak Karo Protestan)
Runggun Berdikari Klasis Medan Kampung Lalang Periode
4. Guru KAKR (Kebaktian Anak dan Kebaktian Remaja) di GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) Runggun Berdikari Klasis Medan Kampung Lalang sejak tahun 2013 – sekarang.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas segala kasih karunia dan berkat-Nya yang masih dapat penulis rasakan sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik.

Tema yang dipilih dalam skripsi ini ialah **“PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KELEMBAGAAN DESA (STUDI PADA KANTOR DESA PERPANDEN KECAMATAN KUTALIMBARU)”**. Adapun maksud dan tujuan diajukannya skripsi ini adalah untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Universitas Medan Area (UMA). Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan dan wawasan penulis, sehingga penulis menerima masukan dan saran dari semua pihak.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara moral maupun materi. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor di Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area..
3. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku dosen pembimbing I yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si selaku ketua program studi administrasi publik sekaligus dosen pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Dra. Nurhayati Harahap, MAP selaku sekretaris skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
7. Kepada keluarga besar FISIPOL khususnya stambuk 2016 yaitu prodi Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi yang telah berpartisipasi.
8. Kepada semua teman-teman penulis yang sudah ikut berkontribusi, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap proposal skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penyusun ucapkan terima kasih.

Medan, 17 Maret 2020

Hormat Penulis,

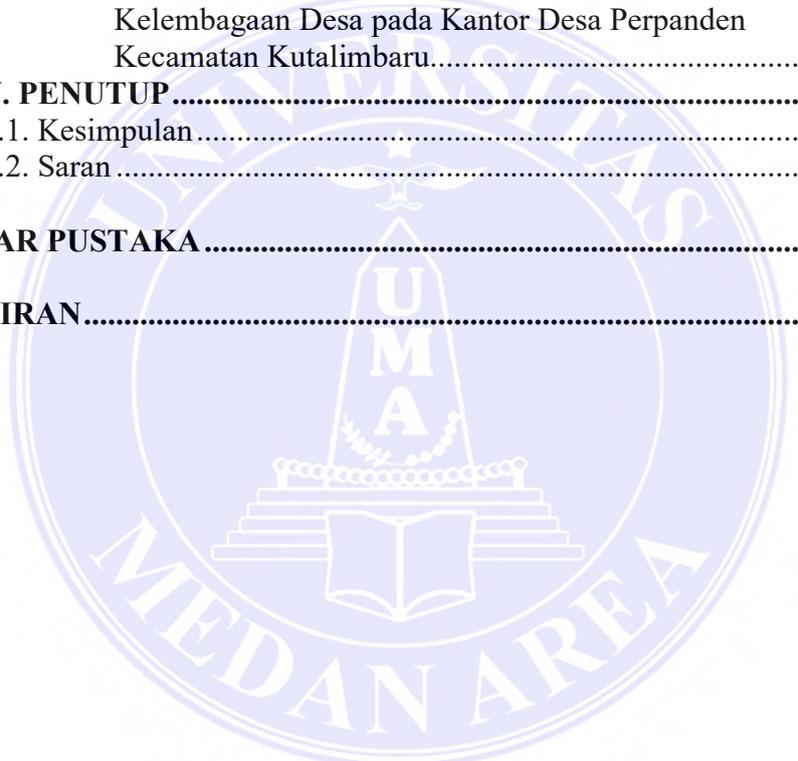
VERNALIA CALESNA BR BARUS

16.852.0026

DAFTAR ISI

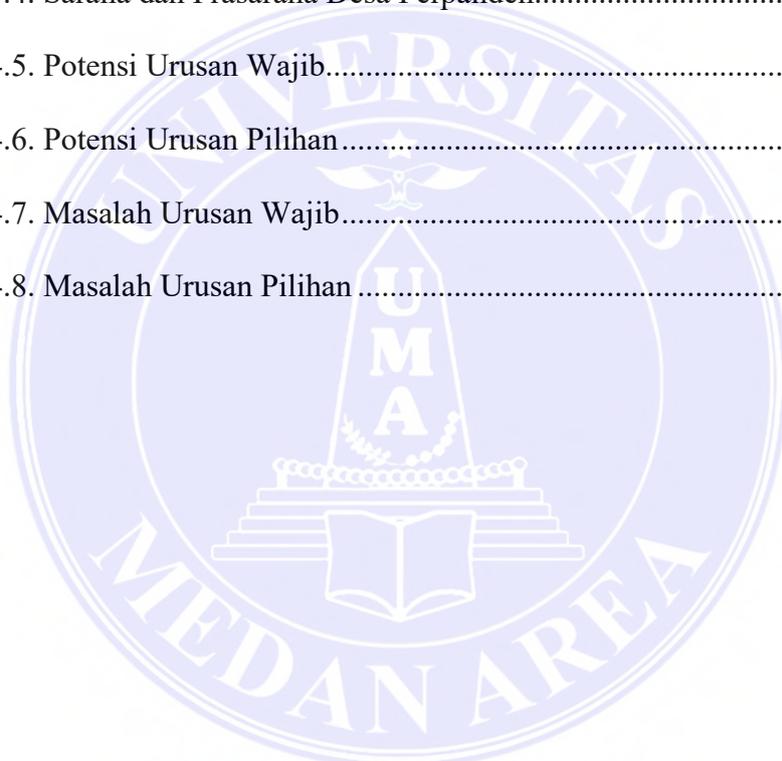
	Halaman
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Fokus Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Uraian Teoritis.....	8
2.1.1. Analisis Gender.....	8
2.1.2. Partisipasi	9
2.1.3. Partisipasi Perempuan	13
2.1.4. Desa.....	17
2.1.5. Kelembagaan Desa.....	20
2.2. Hasil Penelitian yang Sejenis	25
2.3. Kerangka Berfikir	27
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Lokasi Penelitian	30
3.3. Waktu Penelitian.....	31
3.4. Informan Penelitian	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data	33
3.5.1. Kepustakaan	33
3.5.2. Observasi.....	34
3.5.3. Wawancara	34
3.5.4. Dokumentasi	35
3.5.5. Triangulasi Data.....	36
3.6. Teknik Analisis Data	37

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Hasil Penelitian.....	40
4.1.1. Sejarah Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru.....	40
4.1.2. Keadaan Demografi Desa Perpenden.....	42
4.1.3. Keadaan Sosial Desa Perpenden.....	43
4.1.4. Keadaan Ekonomi Desa Perpenden.....	45
4.1.5. Potensi dan Masalah Desa Perpenden.....	47
4.1.6. Jabatan Fungsional BPD Desa Perpenden.....	50
4.1.7. Visi dan Misi Desa Perpenden.....	52
4.1.8. Badan Permusyawaratan Desa Perpenden.....	52
4.2. Pembahasan Penelitian.....	54
4.2.1. Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa di Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru.....	54
4.2.2. Faktor Penghambat Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru.....	60
BAB V. PENUTUP.....	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	74



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Perincian Jadwal Penelitian	31
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Perpenden	43
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	44
Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana Desa Perpenden.....	44
Tabel 4.5. Potensi Urusan Wajib.....	47
Tabel 4.6. Potensi Urusan Pilihan.....	48
Tabel 4.7. Masalah Urusan Wajib.....	48
Tabel 4.8. Masalah Urusan Pilihan.....	49



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman.....	38



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1. Kerangka Berfikir	29
Bagan 4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru.....	51



DAFTAR GRAFIK

Halaman

Garfik 4.1. Persentasi Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin

Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2010-2018 55



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Dokumentasi Tempat Penelitian	74
Data Informan	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi dimana pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Semua proses pembuatan kebijakan politik yang menyangkut kepentingan rakyat harus didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, (3) Setiap warga negara berhak dan wajib serta ikut dalam upaya pembelaan negara. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dimana pemerintah memberikan 30% keterwakilan perempuan untuk setiap daerah. Makna 30% adalah bahwa pemerintah menghimbau perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Pada konteks pembahasan ini, bisa diartikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam mensukseskan program-program pemerintahan, karena sudah diberlakukannya *gender equality* atau kesetaraan gender dimana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama tanpa ada diskriminasi dari aspek manapun, perempuan dan laki-laki dipandang sama dan diperlakukan setara tanpa melihat perbedaan hak. Namun kenyataannya, posisi dan peran perempuan dalam program pemerintahan masih termaginalkan.

Proyeksi pertumbuhan penduduk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan *United Nations Populations Fund* jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Dari jumlah

tersebut, sebanyak 131,88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan (<http://databoks.katadata.co.id>). Hal ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup besar apabila kaum perempuan memiliki kapasitas yang memadai dan ada peluang untuk berperan didalamnya khususnya dalam jabatan politik di Indonesia. Program kesetaraan dan keadilan gender ini tercantum dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Harus diakui bahwa meski sudah ada program kesetaraan dan keadilan gender, namun pada sisi lain masih banyak pula hambatan yang dialami kaum perempuan untuk tampil dalam sektor publik baik ditingkat daerah, nasional, dan internasional, khususnya perempuan yang berada di daerah perdesaan.

Di tengah gencarnya arus globalisasi, peradaban manusia pun semakin berkembang pesat tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Kemajuan teknologi informasi menjadi peluang dan tantangan bagi desa untuk menggali segala sumber daya yang ada untuk menjadi keunggulan desa. Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan bagi desa untuk mengatur tata kelola desa secara leluasa sesuai kewenangan yang dimilikinya dan memberdayakan partisipasi aktif masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Partisipasi masyarakat mengandung makna pelibatan masyarakat desa baik laki-laki maupun perempuan untuk membangun desa. Partisipasi masyarakat adalah bagian terpenting dalam mengidentifikasi persoalan dan potensi, merumuskan konsep, dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Tidak ada pemisahan ataupun pembakuan antara perempuan

dengan laki-laki dalam menjalankan peran masing-masing di setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dimana pemerintah memberikan 30% keterwakilan perempuan untuk setiap daerah. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan mutlak diperlukan untuk bersama-sama membangun desa dan menikmati hasil-hasil pembangunan desa secara adil. Namun fenomena yang terjadi adalah sebaliknya, tingkat partisipasi perempuan masih rendah bahkan masih jauh dari kata maksimal walaupun sudah dibuat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Di desa masih sulit ditemukan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan desa, minimnya perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kelembagaan desa membuat permasalahan perempuan di desa masih sulit untuk diatasi karena permasalahan yang dialami perempuan hanya perempuan lah yang mampu mengatasi dan memberikan solusinya. Sehingga partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa masih menghadapi sejumlah kendala baik struktural maupun kultural. Kendala struktural tersebut seringkali berkaitan dengan permasalahan pendidikan, status sosial, ekonomi, dan pekerjaan. Seperti kaum perempuan hanya berpartisipasi dalam urusan rumah tangga sedangkan dalam hal isu-isu sosial kemasyarakatan menjadi persoalan kaum laki-laki. Sementara kendala kultural terkait dengan faktor budaya dan tradisi yang dianut oleh masyarakat desa seperti menempatkan perempuan sebagai sekedar tinggal dirumah dan mengurus kebutuhan serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pola pemikiran seperti

itulah yang membuat partisipasi perempuan masih memprihatinkan khususnya di desa-desa di seluruh Indonesia.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki enam lembaga desa, yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diantara lembaga-lembaga tersebut yang menjadi fokus penelitian disini adalah lembaga Badan Permusyawaratan Desa. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga bisa dibilang sebagai parlemen desa. Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga desa di daerah pedesaan di Indonesia masih belum berjalan dengan optimal, contohnya adalah Desa Perpenden. Dimana di Desa Perpenden tingkat partisipasi perempuannya masih sangat kurang dalam kelembagaan desa khususnya dalam lembaga BPD di Desa Perpenden Kecamatan Kutalimaru Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan yang terjadi pada lembaga BPD di Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak adanya keterwakilan perempuan dalam struktur fungsional di BPD tersebut. Padahal, peran perempuan dalam pengambilan keputusan di desa sangat dibutuhkan guna kemajuan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan perempuan yang tidak bisa diwakilkan oleh kaum laki-laki karena hanya perempuanlah yang

mengetahui kebutuhan perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pendidikan, pekerjaan, status sosial, tradisi adat-istiadat dan pemaknaan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang lebih mengarah pada patriarki (penekanan pada laki-laki), sehingga mengakibatkan kaum perempuan kurang dilibatkan dalam kelembagaan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru.

1.4. Fokus Penelitian

Peneliti menyadari adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, waktu, dan supaya hasil penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah perihal partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa pada lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru.

1.5. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah :

- a. Dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang diteliti serta mengembangkan kemampuan berfikir penulis dan pembaca melalui penulisan penelitian ini.
- b. Bagi para pengembang pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa.
- c. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi perempuan guna ikut terlibat dalam kelembagaan desa khususnya di Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat memperoleh manfaat praktis sebagai berikut :

a. Bagi Perempuan di Desa Perpenden

Dengan penelitian ini memberikan dorongan dan motivasi kepada perempuan di Desa Perpenden untuk ikut berpartisipasi dalam kelembagaan desa.

b. Bagi Kantor Desa Perpenden

Memberikan sumbangan dalam bentuk keilmuan untuk meningkatkan mutu Kantor Desa Perpenden.

c. Bagi Masyarakat:

Untuk memberikan kesadaran bahwa partisipasi masyarakat sangat penting guna kemajuan daerah tersebut.

d. Bagi Peneliti:

Sebagai wahana untuk latihan dan studi banding antara teori yang sudah didapat di bangku kuliah dengan praktik yang sebenarnya diterapkan dalam dunia pekerjaan maupun dalam lingkungan bermasyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Analisis Gender

Gender merupakan kata yang digunakan atau dipakai untuk membedakan antara laki-laki dengan perempuan baik dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku. Partisipasi perempuan tidak terlepas dari analisis gender, menurut Fakih (1996), analisis gender memberi perangkat teoritis guna memahami ketidakadilan gender. Gender adalah sebuah kata kuno yang diberi makna baru. Dalam perkembangannya, gender menjadi sebuah ideologi. Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”, istilah gender acapkali di rancukan dengan seks. Seks mengacu pada perbedaan biologis, seperti kromosomal, hormonal, atau fisik antara laki-laki dan perempuan; sedangkan gender mengacu pada identitas sosial yang mengandung peranan yang harus dilakukan oleh seseorang karena jenis kelamin mereka, di mana peranan tersebut sesuai dengan konstruksi sosial maupun kultural. Seks diyakini sebagai biologi tubuh, sementara gender mengacu pada asumsi dan praktik budaya yang mengatur konstruksi sosial laki-laki, perempuan dan relasi sosial antara keduanya. Gender merupakan perbedaan antara bentuk nyata dan jenis kelamin yang diberikan, sehingga membentuk dua kategori umum, yaitu *maskulin* dan *feminism* (Jurnal Supartinah, 2010:85).

Perbedaan gender yang berakibat pada munculnya ketidakadilan gender tersebut dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan,

diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial, budaya, melalui ajaran agama bahkan juga oleh negara. Melalui proses yang panjang tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah bersifat biologis dan tidak bisa diubah lagi. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keamanan nasional serta menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain kesetaraan gender dapat dikatakan sebagai persamaan hak dan derajat bagi kaum perempuan (Jurnal Supartinah 2010:85).

Persoalan kesenjangan gender masih tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR, dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian dan kepengurusan di tingkat pusat. Namun hal tersebut hingga saat ini belum tercapai dengan maksimal.

2.1.2. Partisipasi

1) Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah suatu keterlibatan emosional seseorang atau kelompok untuk ikut berperan dan bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat.

Menurut Keith Davis (2000:142) di dalam bukunya "*Human Relational Work*" mengatakan bahwa "*participation is defined as mental and emotional involment of a person in a group situation which ecourages him to contribute to group goals and share resposibility in them*" partisipasi dapat didefenisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung jawabkan keterlibatannya. Menurut Djalal dan Supriadi (dalam Yuwono, 2001:201-202) menjelaskan bahwa makna partisipasi adalah pembuatan keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan keterampilan, barang dan jasa.

Menurut Echols & Shadily (dalam Soetrisno, 2000:419) menjelaskan bahwa pengertian partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikut-sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Menurut Sumaryadi (2005:46) menjelaskan bahwa arti partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Menurut Rahman (2002:120) partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau masyarakat secara langsung

dalam suatu kegiatan atau aktivitas serta ikut bertanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama.

2) Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena jika ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Dalam bukunya partisipasi dan partai politik, Mariam Budiarjo (1998:9) mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy* atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50-60%). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan mengkhawatirkan banyak pemikir Barat yang lalu datang dengan konsep *deliberative democracy*, (Mikkelsen, 2006:110).

Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi politik lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan.

3) Tujuan Partisipasi

Tujuan partisipasi menurut Schiller dan Antlov (dalam Hetifah, 2003:152) yaitu sebagai berikut :

a. Menciptakan Visi Bersama

Merumuskan visi serta nilai-nilai yang dianut atau menjadi dasar suatu organisasi serta visi itu ke depan. Tujuannya yakni menyajikan kebenaran yang definit, namun lebih untuk menstimulasikan debat dan bagaimana mempengaruhi ke masa depan.

b. Membangun Rencana

Setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai, maka dengan bekal itu dapat segera dibuat suatu proses lanjutan untuk membangun rencana.

c. Mengumpulkan Gagasan

Dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis, dengan maksud mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan dari semua orang yang menjadi peserta proses partisipasi.

d. Menentukan Prioritas (Membuat Pilihan)

Bertujuan untuk mengorganisir berbagai ide yang muncul dalam proses partisipasi dengan memanfaatkan kualitatif.

e. Menjaring Aspirasi (Masukan)

Bertujuan untuk pertukaran informasi, gagasan, dan kepedulian tentang suatu isu atau rencana antara pemerintah dan perencana dengan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat memperoleh kesempatan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan, memberikan alternatif, desain, pilihan investasi beserta pengelolaannya.

f. Mengupulkan Informasi.

Bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang serta bagaimana mengoptimalkannya, selain mengidentifikasi kelemahan dan ancaman, juga untuk mempermudah merumuskan langkah-langkah untuk mengatasinya.

2.1.3. Partisipasi Perempuan

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan. Sejauh ini masih sedikit perempuan yang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Representasi perempuan dalam lembaga pemerintahan sangat perlu karena kondisi Indonesia masih kuat dengan budaya patriarki dan kesadaran kesetaraan gender orang Indonesia masih rendah. Representasi adalah keterwakilan atau kehadiran perempuan dalam posisi

pengambilan keputusan dan penentu kebijakan di lembaga-lembaga pemerintahan atau tempat tinggal. Kurangnya kesadaran itu menyebabkan perempuan masih dibawah laki-laki keberadaannya (Jurnal Supartinah, 2010:87).

Menurut Keith Devis dalam Naning Margasari, partisipasi harus melibatkan mental dan emosional dalam situasi kelompok dan rasa tanggungjawab terhadap kelompok. Dari pengertian tersebut, ini mengingatkan bahwa memang mental dan emosional perempuan dan laki-laki tidak sama. Perempuan cenderung lebih emosional dan memiliki mental yang lemah dari laki-laki. Hal ini juga akan mempengaruhi kesadaran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Menurut Ramlan Surbakti (2004:404) menyebutkan beberapa hambatan yang dirasakan perempuan dalam berpartisipasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dilihat dari segi pendidikan, segi kultur budaya, segi keluarga, dan segi diri perempuan sendiri sedangkan faktor eksternal dilihat dari segi sosialisasi atau pengarahan, segi pandangan tentang politik, dan segi peran lokal.

Partisipasi perempuan dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga, desa, kota, hingga tingkat nasional bahkan internasional. Dalam tingkat mikro perempuan berperan dalam lingkungan rumah, di tingkat organisasi masyarakat dan bahkan ke tingkat makro yaitu partai politik, parlemen dan di struktur pemerintahan. Sehingga kata-kata "kesetaraan gender" bukanlah hanya sekedar retorika. Perhatian disini bukan dalam artian "kuantitas" namun dengan menempatkan kaum perempuan dengan "kualitas" yang pantas ditempatkan pada

nomor "prioritas" dan mengacu kepada prinsip hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia (Jurnal Supartinah, 2010:88).

1) Partisipasi Perempuan dalam Politik

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menggolkan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Partisipasi politik adalah segala macam kegiatan dibidang politik mulai dari mempengaruhi kebijakan, menentukan atau memilih pembuat kebijakan sampai pada menghambat atau menentang sebuah kebijakan (Skripsi Susi Susanti, 2015:11 & 14).

Partisipasi politik perempuan dapat diartikan sebagai keterlibatan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan politik. Saat ini, partisipasi politik perempuan masih tergolong rendah apabila dilihat dari bentuk partisipasi politiknya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Sejarah Indonesia mencatat bahwa tokoh pahlawan perlawanan Belanda sebagian besar adalah pria. Hal tersebut berkaitan pada asumsi dasar masyarakat tentang perempuan bahwa secara alami perempuan sudah kodratnya untuk dilindungi sehingga hanya diberi tanggung jawab domestik. Sejak era kerajaan sampai pada perlawanan Indonesia terhadap kolonial, peran perempuan sangat marginal. Marginalitas itu diperparah ketika komunitas wanita dilarang untuk menikmati fasilitas pendidikan, hal ini sesuai dengan surat yang ditulis oleh Raden Adjeng Kartini yang berisikan tentang

gagasan dan ambisi untuk wanita diberi kebebasan mendapatkan pendidikan (Skripsi Susi Susanti, 2015:15).

Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia merupakan salah satu cerminan dari adanya keadilan di dalam demokrasi yang sekarang sedang berusaha diwujudkan di dalam masa transisi. Aspek partisipasi perempuan di dalam demokrasi bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba melainkan memerlukan kesadaran dan kepedulian dari seluruh masyarakat kita. Namun sayangnya kondisi partisipasi perempuan di panggung politik masih sangat rendah, di mana sistem politik di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki sehingga dengan sendirinya bila diberlakukan kondisi alamiah, maka panggung politik tetap akan didominasi secara mayoritas oleh kaum laki-laki. Masyarakat dalam partisipasi politik sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh lembaga sosial dalam meningkatkan partisipasi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik secara maksimal (Skripsi Susi Susanti, 2015:16).

2) Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa

Upaya memberdayakan perempuan perlu terus dilakukan agar mereka tidak terjebak sebagai objek melainkan dapat berperan sebagai subjek dan memberikan seluruh potensinya dalam proses pembangunan. Untuk itu keterlibatan perempuan dalam kelembagaan desa mutlak diperlukan agar dalam proses pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan kepentingan kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dalam sektor publik ini akan memberikan peluang terhadap pemecahan masalah-masalah perempuan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan mereka. Permasalahan perempuan ditingkat basis ini pada

umumnya merupakan masalah-masalah yang mendasar dalam kehidupan, misalnya masalah air, kesehatan ibu dan anak dan sebagainya. Pemecahan masalah-masalah perempuan akan lebih tepat apabila melibatkan perempuan. Dengan melibatkan perempuan dalam kelembagaan desa juga mempunyai arti memberi kesempatan kepada kaum perempuan dalam tanggungjawab sosialnya selain itu potensi yang dimiliki perempuan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu menjadi strategis dengan melibatkan perempuan dalam proses pembangunan melalui kelembagaan desa dari penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sehingga ada keseimbangan antara perempuan dengan laki-laki mengingat pada sekarang ini sudah diberlakukannya kesetaraan gender, yaitu laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, baik itu dalam jabatan di struktur pemerintahan (Jurnal Endang Widayati, 2015:570).

2.1.4. Desa

1) Pengertian Desa

Menurut Widjaja (2001:42) posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa, maka dalam pengembangan peran serta masyarakat, pemerintah desa selaku pembina, pengayom, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengertian desa secara umum menurut Daldjoeni (2003:53) adalah pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya berjiwa agraris, sedangkan desa dalam artian administratif menurut Karthohadikusumo dalam Daldjoeni (2003:54) yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan pembentukan desa sebagai mana yang dimaksud harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk,
2. Luas wilayah,
3. Bagian wilayah kerja,
4. Perangkat, dan
5. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), dan Keputusan Kepala Desa. Di desa di bentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

2) Pemerintahan Desa

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal-usul dan prakarsa masyarakat. Desa di Kabupaten secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi desa sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD yang ditetapkan dengan perda.

Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat lainnya. Sekretaris Desa terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2005:138) pemerintah desa mempunyai tugas pokok, yaitu :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun, dan membina masyarakat,
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi, yaitu :

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa,

2. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya,
3. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa,
4. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya dan gotong royong masyarakat,
5. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
6. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan antar masyarakat,
7. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa,
8. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepala desa.

2.1.5. Kelembagaan Desa

Kelembagaan sering dihubungkan dengan organisasi, wadah atau pranata. Sesungguhnya kelembagaan lebih luas dibanding dengan organisasi. Dalam kelembagaan ada kode etik, aturan main, sikap dan tingkah laku yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Menurut Syahyuti, norma dan perilaku merupakan dua objek pokok dalam kajian kelembagaan, sementara organisasi lebih memperhatikan masalah struktur dan peran.

Pengertian kelembagaan tidak terlepas dari pengertian lembaga. Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan (Ruttan dan Hayami, 1984). Menurut North DC (1990), lembaga adalah aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi dapat berupa aturan formal atau dalam bentuk kode etik informal yang

disepakati bersama. Oleh karena itu, keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (*service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Komponen kelembagaan menurut Syahyuti (2006) adalah sebagai berikut :

1. *Person* (Orang)

Orang-orang yang terlibat dalam kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.

2. Kepentingan

Orang-orang tersebut sedang diikat oleh satu kepentingan/tujuan, sehingga mereka terpaksa harus saling berkomunikasi.

3. Aturan

Setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.

4. Struktur

Setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-ubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kelembagaan tersebut, cukup jelas perbedaan antara organisasi dan lembaga. Kelembagaan lebih dinamis dibanding organisasi. Adanya aturan main, kode etik, bagi setiap anggota dalam

menggerakkan sikap, perilaku, norma dan kepentingan akan membawa kelembagaan mencapai tujuannya. Aturan main yang disepakati bersama baik secara formal maupun informal menjadi pegangan lembaganya. Aturan main akan mempengaruhi perilaku setiap unsur yang ada.

1) Jenis-jenis Lembaga Desa

Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga desa yakni :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa. Dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa selaku pembantu tugas- tugas kepala desa. Perangkat desa merupakan unsur yang terdiri dari unsur Staf (Sekretariat Desa), unsur Lini (Pelaksana Teknis Lapangan), dan unsur Kewilayahan (para Kepala Dusun).

Pemerintah Desa mamiliki beberapa unsur yaitu unsur Kepala (Kepala Desa), unsur Pembantu Kepala atau Staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur Pelaksana Teknis Fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana Teritorial (Kepala Dusun), senantiasa ditata dalam suatu kesatuan

perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi pemerintah desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja pemerintah desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Keanggotaan BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan BPD adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. Anggota BPD dapat dipilih paling banyak selama 3 (tiga) periode.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah dasar, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

3. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan Desa wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi yaitu menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan

masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa, menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga Adat mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

5. Kerjasama Antar Desa

Kerjasama Antar Desa yakni meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan desa, dan pemberdayaan antar desa, bidang keamanan dan ketertiban.

6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha BUMDes digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir.

Menyelenggarakan pembangunan desa, desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti yang tersebut diatas, untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerinthan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa yakni :

1. Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut,
2. Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut.

2.2. Hasil Penelitian yang Sejenis

Penelitian sejenis yang peneliti ambil dikutip dari penelitian Endang Widayati yang berjudul **“Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi Kasus pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Umbulmartani dan Jogotirto)”** tahun 2015 dalam Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta ISBN 978-602-73690-3-0 (<http://repository.upy.ac.id/id/eprint/354>).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa BKM di tinjau dari profil aktivitas perempuan dalam BKM, akses dan kontrol perempuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa sejak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, faktor-faktor yang mendukung partisipasi perempuan dalam BKM, serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam BKM.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai partisipasi perempuan dalam Kelembagaan Desa (studi kasus pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Umbulmartani dan Jogotirto) secara rinci yaitu tugas pokok BKM diantaranya merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan, mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif dari tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi. BKM merupakan lembaga kepemimpinan kolektif, dengan jumlah anggota 13 orang dikoordinir oleh seorang koordinator. Sebagai lembaga kepemimpinan kolektif semua anggota mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kolektifitas kepemimpinan ini bertujuan untuk dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan bijaksana karena tidak didasarkan kepada kekuatan dan kepentingan seseorang. Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan desa (BKM) diharapkan akan memunculkan kebijakan/keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan. Lebih jauh terdapatnya akses dan kontrol perempuan dalam kelembagaan khususnya dalam penyusunan program dapat mempengaruhi kehidupan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perempuan yang dilibatkan dalam perencanaan dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan dasar perempuan yang seringkali terlewatkan (terlupakan) ketika penyusun rencana kegiatan adalah kaum laki-laki.

Berdasarkan beberapa deskripsi sebelumnya dan informasi dari responden, pada saat ini khususnya di desa Jogotirto dan Umbulmartani dapat dikatakan hampir tidak ada kendala atau hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi

dalam proses pembangunan, baik dari sisi kebijakan, peraturan dan perundangan; kultur, budaya, norma, adat, agama; lingkungan keluarga maupun lingkungan pada umumnya

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

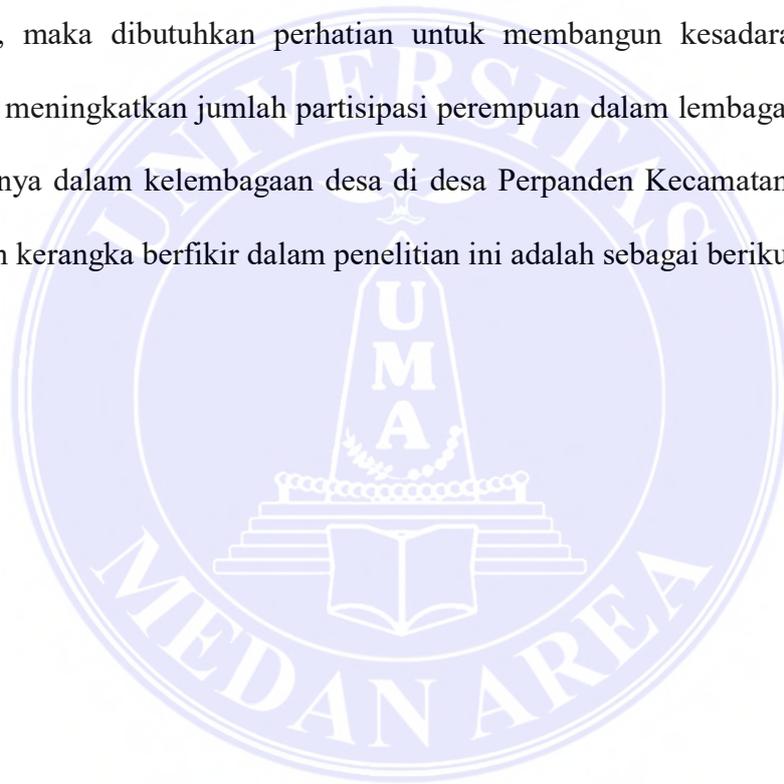
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kelembagaan desa dan lokasinya. Dimana kelembagaan desa dalam penelitian ini adalah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sedangkan penelitian yang dilakukan adalah di Kantor Desa bagian lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta lokasi penelitiannya di Desa Umbulmartani dan Jogotirto sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru.

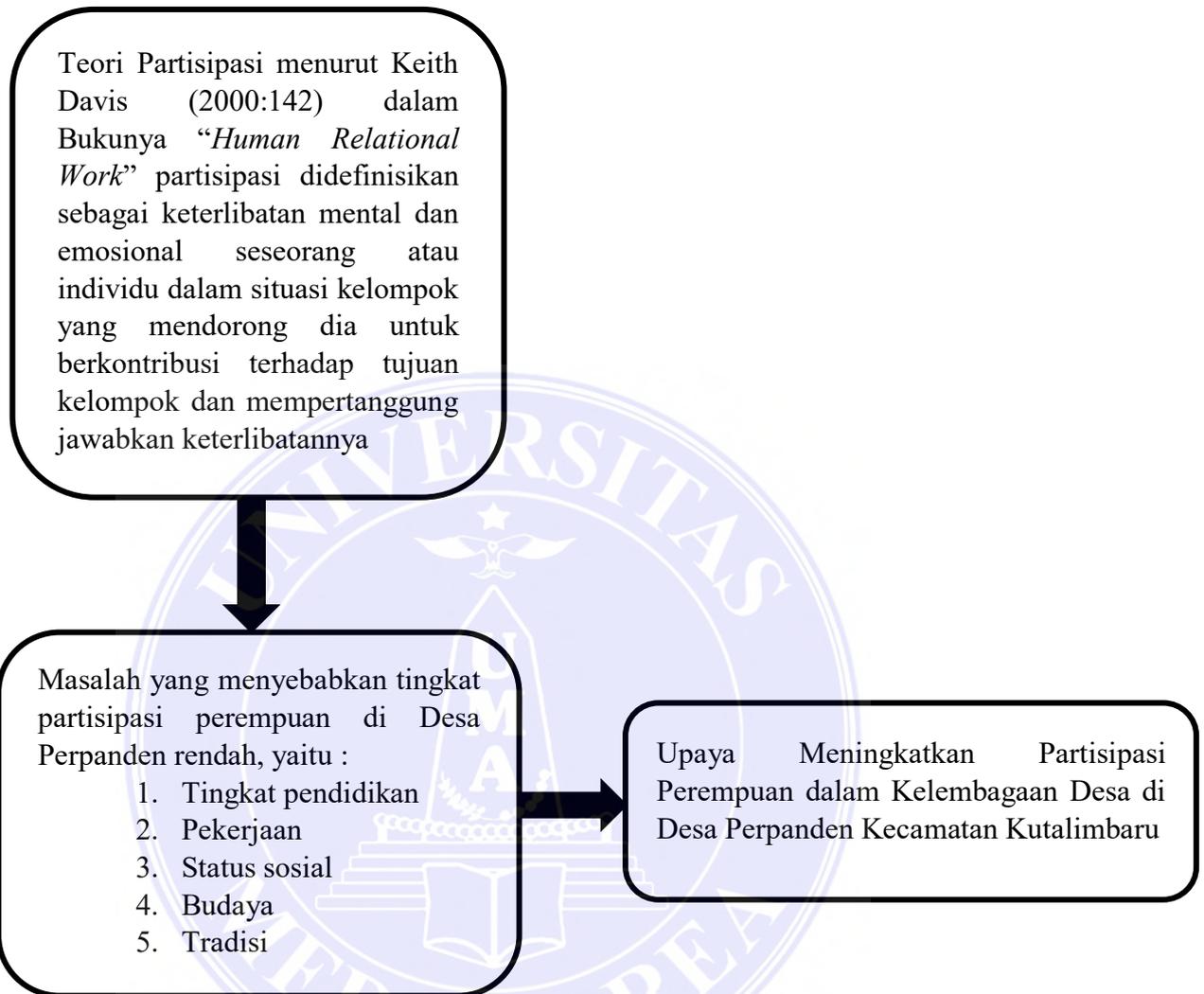
2.3. Kerangka Berfikir

Teori partisipasi menurut Keith Davis (2000:142) dalam bukunya “*Human Relational Work*” partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggungjawabkan keterlibatannya.

Tingkat partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Desa Perpanden masih rendah. Adapun masalah yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan di Desa Perpanden adalah disebabkan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial, budaya, dan tradisi.

Partisipasi perempuan sejauh ini dalam lembaga pemerintahan masih sedikit. Keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dan penentu kebijakan juga masih rendah. Hal tersebut terlihat dalam kelembagaan desa di Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru khususnya di lembaga BPD. Dimana tidak ada perempuan yang ikut terlibat dalam struktur fungsional BPD. Kurangnya kesadaran itu menyebabkan perempuan masih dibawah laki-laki keberadaannya. Sehingga kata-kata “kesetaraan gender” masih menjadi retorika semata, maka dibutuhkan perhatian untuk membangun kesadaran perempuan supaya meningkatkan jumlah partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan khususnya dalam kelembagaan desa di desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :





Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Imam Gunawan, 2016:82) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Sementara itu menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtle (dalam Emzir, 2016:2) penelitian kualitatif, yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting pendidikan.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis berada di Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

3.3. Waktu Penelitian

Penelitian tentang “Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Deli Serdang)” dimulai sejak judul tugas akhir ini disetujui. Adapun tahap-tahap perincian kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dipaparkan dalam tabel 3.1 berikut ini :

NO	Kegiatan	Bulan Ke :							
		September 2019	Oktober 2019	November 2019	Desember 2019	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020	April 2020
1.	Tahap Persiapan Penelitian								
	a. Pengajuan Judul								
	b. Penyusunan Proposal								
	c. Seminar Proposal								
	d. Perbaikan Proposal								
2.	Tahap Pelaksanaan Penelitian								
	a. Pengumpulan Data								
	b. Analisis Data								
	c. Perumusan Hasil Penelitian								
	d. Seminar Hasil								
3.	Tahap Penyelesaian								
	a. Revisi Skripsi								
	b. Sidang Meja Hijau								
	c. Penyerahan Skripsi								

Sumber : Diolah oleh Penulis (2019)

Tabel 3.1 Perincian Jadwal Penelitian

3.4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang-orang yang akan memberikan informasi terhadap objek yang akan diteliti. Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti.

Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut Hendarsono (dalam Suyanto, 2005: 171-172), informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informant*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang menjadi informan kunci yaitu Bapak Rahmat selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru.
2. Informan utama (*main informant*), yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Kalpin Barus selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru.
3. Informan tambahan (*additional informant*), yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Ibu Rosmita dan Ibu Ariana Fransiska br Sinulingga selaku masyarakat perempuan di Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru.

Berdasarkan uraian di atas, maka informan ditentukan dengan teknik *purposive* yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan dengan informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informan pada penelitian ini adalah yang telah mewakili dan disesuaikan dengan peranannya mengetahui Partisipasi Perempuan di Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian guna memperoleh informasi yang jelas yang dibutuhkan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Gay dan Airasian (dalam Emzir, 2016:37) mengemukakan bahwa observasi, wawancara, dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal semua merupakan sumber data kualitatif. Sumber yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi sumber data. diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Adapun metode pengumpulan data adalah sebagai berikut :

3.5.1. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan

penelitian, karangan-karangan ilmiah, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan dan sumber-sumber tertulis.

3.5.2. Observasi

Menurut Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi (2015:70) observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Menurut Kartono (dalam Imam Gunawan, 2016:143) pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:90) observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa observasi adalah proses pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang akan diteliti dengan melakukan pencatatan yang sistematis.

Sesuai dengan objek penelitian, dalam melakukan observasi peneliti harus terlebih dahulu meninjau ke lokasi ataupun tempat yang ingin diteliti. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru. Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, alamat, nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

3.5.3. Wawancara

Menurut Setyadin (dalam Imam Gunawan, 2016:160) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan

proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Hasan (dalam Emzir, 2016:52) wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi Bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

Peneliti melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.

3.5.4. Dokumentasi

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:106) teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Imam Gunawan (2016:175) mengemukakan bahwa sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam,

yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, data tersimpan di *website*, dan lain-lain.

Menurut Tohirin (2012:68) dokumen terdiri atas dua macam yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi, seperti buku harian yang dibuat oleh subjek yang diteliti, surat pribadi yang dibuat dan diterima oleh subjek yang diteliti, dan otobiografi, yaitu riwayat hidup yang dibuat sendiri oleh subjek penelitian atau informan penelitian. Dokumen resmi, seperti Surat Keputusan (SK) dan surat-surat resmi lainnya. Data ini bisa dikumpulkan dengan cara memfotokopi atau difoto menggunakan alat foto atau kamera tangan.

Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data yang ada di Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

3.5.4. Triangulasi Data

Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (realibilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi menurut Mantja (dalam Imam Gunawan, 2016:218) dapat juga digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan. Triangulasi juga merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan triangulasi merupakan suatu cara

mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda.

Berdasarkan pengumpulan data ini, peneliti memakai triangulasi dengan tujuan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber untuk memperoleh data. Selain menggunakan wawancara dan observasi peneliti juga menggunakan dokumen tertulis, catatan pribadi, catatan resmi, sehingga menghasilkan bukti atau data yang berbeda.

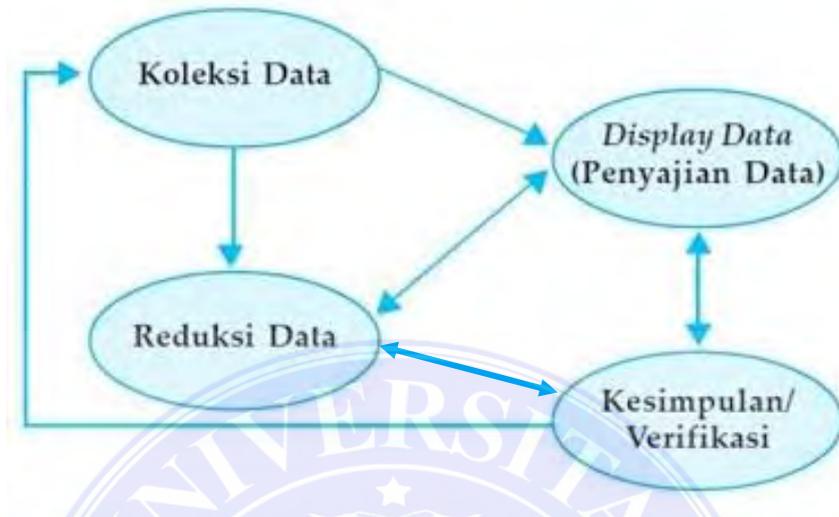
3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk mengolah data menjadi informasi supaya lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami sehingga bermanfaat untuk menemukan solusi terhadap suatu permasalahan dalam penelitian. Sementara itu, Bogdan dan Biklen (dalam Imam Gunawan, 2016:210) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Menurut Afrizal (2016:19) ada dua tahap analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu pertama pada tahap pengumpulan data dan oleh sebab itu analisis data dilakukan di lapangan; kedua dilakukan ketika penulisan laporan dilakukan. Jadi dengan demikian, analisis data dilakukan mulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Oleh sebab itulah, analisis data dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*).

Miles dan Huberman (dalam Imam Gunawan, 2016:210) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif,

yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).



Sumber : Imam Gunawan, 2016

Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman

Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2018:247). Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2018:252).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

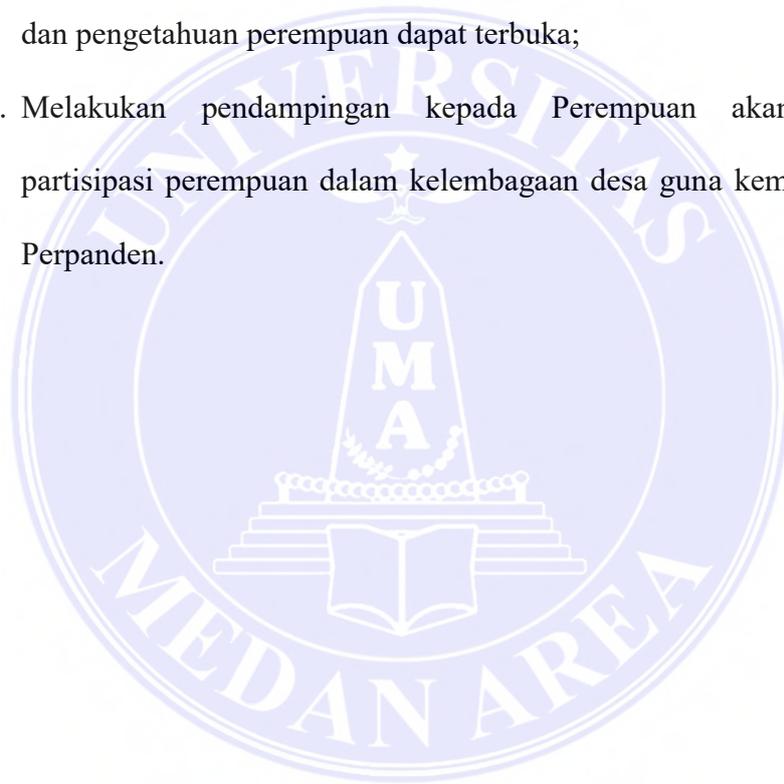
Berdasarkan hasil analisis/penelitian serta data-data observasi maupun wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Perpanden sudah memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan agar perempuan ikut berperan dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan kelembagaan desa. Namun kenyataannya, kesadaran masyarakat perempuan di Desa Perpanden yang masih kurang, sehingga partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpanden masih rendah dan belum berjalan dengan optimal.
2. Faktor penghambat partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa pada Kantor Desa Perpanden disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat internal yaitu faktor segi pendidikan, segi kultur budaya, dan segi keluarga, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar yang melingkupi sosialisasi atau pengarahan khusus untuk perempuan dan segi peran lokal.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru adalah sebagai berikut :

1. Memberikan motivasi dan arahan/sosialisasi rutin dan terjadwal khusus untuk perempuan di Desa Perpanden, motivasi yang diberikan dapat berupa motivasi secara sosial maupun motivasi pemberian semangat dengan mendatangkan orang-orang yang berwenang tujuannya untuk mengubah pola pikir perempuan ke arah yang modern;
2. Mengembangkan pendidikan informal berbasis keterampilan dan kewirausahaan terhadap perempuan di Desa Perpanden supaya wawasan dan pengetahuan perempuan dapat terbuka;
3. Melakukan pendampingan kepada Perempuan akan pentingnya partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa guna kemajuan di Desa Perpanden.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Daulay, R. S. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. *Universitas Medan Area*.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2015). *Metodologi Penelitian : Memberi Bekal Teoretis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan Penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supartinah. (2010). Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa (Studi Kasus pada Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal DIMENSIA, Volume 4, Nomor 2, 2010*.
- Surbakti, R. (2004). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Susanti, S. (2015). Partisipasi Politik Perempuan (Studi pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2014 Kota Medan). *Universitas Medan Area*.
- Suyanto, & Bagong. (2005). *Metode Penelitian Sosial : berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tiffani, W. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu. *Universitas Medan Area*.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Karya Ilmiah :

- Daulay, R. S. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. *Universitas Medan Area*.
- Supartinah. (2010). Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa (Studi Kasus pada Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal DIMENSA, Volume 4, Nomor 2, 2010*.
- Susanti, S. (2015). Partisipasi Politik Perempuan (Studi pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2014 Kota Medan). *Universitas Medan Area*.
- Tiffani, W. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu. *Universitas Medan Area*.
- Widayati, E. (2015). Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi Kasus pada BKM Desa Umbulmartani dan Jogotirto). *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta ISBN 978-602-73690-3-0*.

Perundangan :

Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Artikel Internet :

<http://www.materipelajar.com/2017/11/pengertian-partisipasi.html?m=1>, (diakses pada tanggal 4 Oktober 2019).

<http://www.materipelajar.com/2017/11/tujuan-partisipasi.html?m=1>, (diakses pada tanggal 9 Oktober 2019).

<http://putatgede.desa.id/2018/kelembagaan-di-desa-menurut-uu-nomor-6-tahun-2014/>, (diakses pada tanggal 11 Oktober 2019).

<http://docplayer.info/36872479-Partisipasi-perempuan-dalam-pembangunan-desadi-kecamatan-kao-utara-kabupaten-halmahera-utara.html>, (diakses pada tanggal 14 Oktober 2019).

<http://databoks.katadata.co.id>, (diakses pada tanggal 06 November 2019)

<http://bps.go.id>, (diakses pada tanggal 12 Januari 2020)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/20

LAMPIRAN

Dokumentasi Tempat Penelitian

Gambar 1
Kantor Desa Perpanden



Gambar 2
Struktur Pemerintahan Desa Perpanden



Gambar 3
 Profil Desa Perpanden

PROFIL DESA PERPANDEN KEC. KUTALIMBARU - KAB. DELI SERDANG	
* Desa Perpanden Berdiri Pada Tahun 1963	
* Luas Wilayah	: 24000 Ha
* Batas Wilayah	: Utara => Desa Sampe Cita
	: Selatan => Desa Suka Makmur
	: Timur => Desa Pasar X Dan Desa Namomirik
	: Barat => Sungai Mencirem Kab. Langkat
* Wilayah Desa Perpanden Terdiri Dari Lahan Pertanian Dan Perkebunan	
* Mata Pencarian Penduduk Sebagian Besar Petani/Pekebun	
* Desa Perpanden Dipimpin Oleh Bpk. Setia Budi	
* Jumlah Dusun	: 8 dusun
* Jumlah Kepala Keluarga	: 621 kk
* Jumlah Penduduk	: 2.201 jiwa
Laki - Laki	: 1.079 jiwa
Perempuan	: 1.122 jiwa
* Jumlah Bayi	: 47 Org (Lk. 25 Org, Pr. 22 Org)
* Jumlah Anak Balita	: 187 Org (Lk. 103 Org, Pr. 84 Org)
* Jumlah Balita	: 234 Org (Lk. 128 Org, Pr. 106 Org)
* Jumlah Lansia	: 432 Org (Lk. 204 Org, Pr. 228 Org)
* Jumlah PUS	: 312 Org
* Jumlah WUS	: 653 Org
* Jumlah Akseptor KB	: 210 Org
* Jumlah Posyandu Balita	: 1 Pos
* Jumlah Posyandu Bumil	: 1 Pos
* Jumlah Posyandu Lansia	: 1 Pos
* Jumlah Posbindu	: 1 Pos
* Jumlah Keluarga Tidak Mampu	: 195 KK
* Puskesmas Pembantu	: 1 Unit
* Tenaga Bidan	: 3 Org
* Tenaga Perawat	: 1 Org
* Kader Posyandu	: 15 Org
* Praktek Bidan Swasta	: 2 Org

Gambar 4
 Peta Desa Perpanden



Gambar 5
Kepala Desa & Aparat Desa Perpenden



Gambar 6
Ketua BPD & Aparat Desa Perpenden



Gambar 7

Informan Kunci

Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu Bapak Rahmat



Gambar 8

Informan Utama

Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu Bapak Kalpin Barus



Gambar 9
Informan Tambahan Pertama
Masyarakat Perempuan Desa Perpenden yaitu Rosmita



Gambar 10
Informan Tambahan Kedua
Masyarakat Perempuan Desa Perpenden yaitu Ariana Fransiska br Sinulingga



Gambar 11
Rapat di Kantor Desa Perpenden



DATA INFORMAN

1. Informan Kunci

Nama : Rahmat
Alamat : Dusun VII Kutabangun Desa Perpanden
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 36 Tahun
Pendidikan : SLTA
Jabatan : Ketua BPD
Pekerjaan : Wiraswasta dan Ketua BPD

2. Informan Utama

Nama : Kalpin Barus
Alamat : Dusun II Pola Mulo Desa Perpanden
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 47 Tahun
Pendidikan : SLTA
Jabatan : Wakil Ketua BPD
Pekerjaan : Wiraswasta dan Wakil Ketua BPD

3. Informan Tambahan

Nama : Rosmita
Alamat : Dusun II Pola Mulo Desa Perpanden
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 40 Tahun
Pendidikan : SLTA
Jabatan : Masyarakat Desa Perpanden
Pekerjaan : Guru PAUD dan Bendahara CU Galimadu

Nama : Ariana Fransiska br Sinulingga
Alamat : Dusun VII Kutabangun Desa Perpanden
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 20 Tahun
Pendidikan : SMK
Jabatan : Masyarakat Desa Perpanden
Pekerjaan : Operator CU Galimadu





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : *gus* /FIS.2/01.10/XI/2019
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

15 November 2019

Yth,
Ka. Desa Perpenden
Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Vernalia Calesna Br Barus
N P M : 168520026
Program Studi : Administrasi Publik

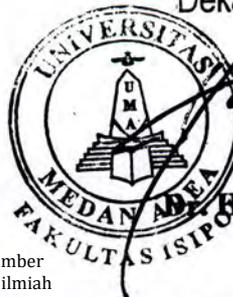
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Kepada Desa Perpenden, dengan judul Skripsi "**Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi Pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru)**"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,



Heri Kusmanto, MA Document Accepted 7/10/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN KUTALIMBARU
DESA PERPANDEN**

KODE POS : 20354

SURAT BALASAN

Nomor : 280/021/XI/2019

Perpanden, 18 November 2019

Lampiran : -

Kepada Yth :

Perihal : **Izin Riset**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA

Di -

Tempat,

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 948/FIS.2/01.10/XI/2019 tertanggal 15 November 2019 tentang Pengambilan Data/Izin Riset. Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru)"**. Menerangkan bahwa Mahasiswa yang identitasnya tertera di bawah ini :

Nama : **Vernalia Calesna br Barus**

NPM : 16.852.0026

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Universitas Medan Area

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dengan ini kami memberikan izin untuk melaksanakan penelitian/riset di Kantor Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru selama satu bulan terhitung sejak tanggal 25 November 2019 s/d 28 Desember 2019.
3. Demikian surat ini kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA PERPANDEN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/20



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN KUTALIMBARU
DESA PERPANDEN**

KODE POS : 20354

SURAT KETERANGAN

Nomor : 301/021/XII/2019

Lampiran : -

Perihal : **Hasil Pengambilan Data**

Perpanden, 30 Desember 2019

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA

Di -

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 948/FIS.2/01.10/XI/2019 tertanggal 15 November 2019 tentang Pengantar/Izin Riset. Dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : **“Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru)”**.
2. Berknaan dengan hal tersebut maka Mahasiswa yang identitasnya tertera di bawah ini :

Nama : **Vernalia Calesna br Barus**

NPM : 16.852.0026

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Universitas Medan Area

Bahwa nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan tugas pengambilan data/riset sebagai bahan penyusunan Skripsi sesuai dengan judul tersebut di Kantor Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru.

3. Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai dengan yang dimaksud.

KEPALA DESA PERPANDEN



SETIA BUDI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PERPUSTAKAAN

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN No. : 1887/I/BP/PUMA/2020

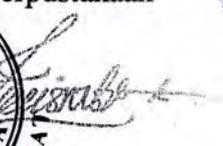
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan Universitas Medan Area Menerangkan bahwa :

Nama : Vernalia Calesna Br Barus
No. Stambuk : 168520026
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : ISIPOL

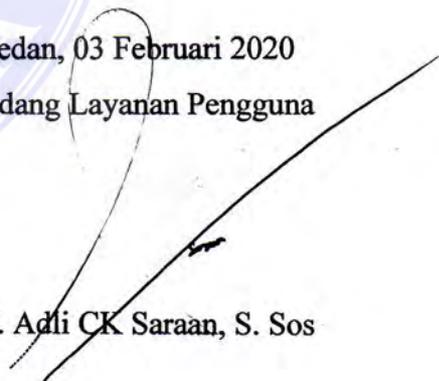
benar telah bebas pinjam bahan pustaka dari Perpustakaan Universitas Medan Area, dan telah bebas biaya buku pustaka.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Perpustakaan


Budiani, MT

Medan, 03 Februari 2020
Bidang Layanan Pengguna

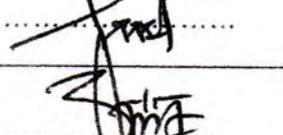
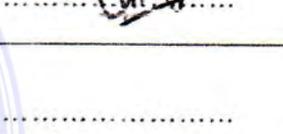
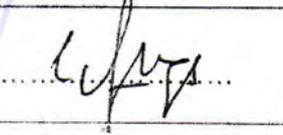
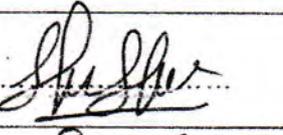
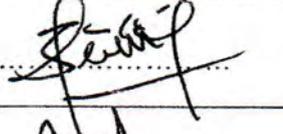
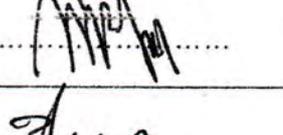
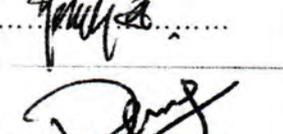
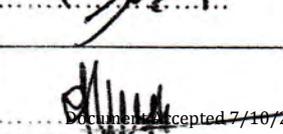

M. Adli CK Saraan, S. Sos

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2018-2024

DESA : PERPANDEN

KECAMATAN : KUTALIMBARU

TANGGAL : Kamis, 05 April 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	JETIA BUDI	Kepala Desa	
2.	PERMANA	Sekretaris Desa	
3.	JAMUEL	Kaur Pemerintahan	
4.	KISAR	Kaur Pembangunan	
5.	HERIANDI	Kaur Umum	
6.		Ketua LKMD
7.		Anggota LKMD
8.	Cetina br Gings	Ketua PKK	
9.		Ketua Karang Taruna
10.	Agustianus Sinaga	Kepala Dusun I	
11.	IMANUEL S. SORUB	Kepala Dusun II	
12.	J. ERBIT S	Kepala Dusun III	
13.	Sempurna	Kepala Dusun IV	
14.	DAVINI SINDILINA	Kepala Dusun V	

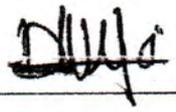
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document accepted 7/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/20

17	DIAPNAHUTA.	Dusun VIII	
18		Tokoh Masyarakat	
19		Tokoh Agama	
20			
21			
22			
23			
24			

BPD Desa PERPANDEN

Sekretaris,


(RISWANTO)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PERPANDEN

1. Ketua / Anggota : RAHMAT

()

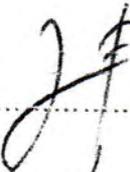
2. Wakil Ketua/Anggota : KALPIN

()

3. Sekretaris / Anggota : RISWANTO

()

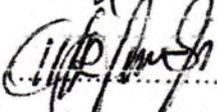
4. Anggota 1. SETIA BUDI

()

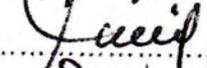
2. RAHMAT SEMBIRING

()

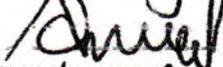
3. RIWAHONG

()

4. ESRA

()

5. BAHAGIA

()

6. DAPIT

()

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

Penduduk Desa Perpenden berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, Dimana Mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari provinsi Sumatera utara sehingga teradisi –tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Perpenden dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antara kelompok masyarakat.

Desa Perpenden memiliki jumlah penduduk berdasarkan Jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 621 KK
2. Laki-laki : 1.079 jiwa
3. Perempuan : 1.122 jiwa
4. Jumlah Penduduk : 2.201 jiwa

Desa perpenden memiliki 8 wilayah/Dusun, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK

DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	DUSUN IV	DUSUN V	DUSUN VI	DUSUN VII	DUSUN VIII
546 org	369 org	178 org	176 org	143 org	178 org	338 org	254 org

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Perpenden sebagai berikut :

TABEL 2
JUMLAH PENDUDUK

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana	Pasca Sarjana
92 org	212 org	126 Org	88 org	11 Org	3

Desa Perpenden Desa Pertanian Maka sebagian besar penduduknya Bermata pencaharian sebagai petani, Selengkapnya sebagai berikut :

TABEL 3
PEKERJAAN

Petani	Pedagang	PNS	Buruh	TNI	Pegawai Swasta	Tukang
897 org	64 org	6 org	67 org	2 org	7 org	30 org

Jumlah Kepemilikan hewan ternak oleh Penduduk Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru adalah sebagai berikut :

TABEL 4
KEPEMILIKAN TERNAK

AYAM/TIK	KAMBING	SAPI	KERBAU	IKAN
87 KK	23 KK	65 KK	22 KK	

Kondisi Sarana dan Prasarana Umum Perpanden secara garis besar adalah sebagai berikut

TABEL 5
SARANA DAN PRASARANA DESA

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	KETERANGAN
1	Balai Desa	2	
2	Kantor Desa	1	
3	Puskesmas Pembantu	1	
4	Mesjid	2	
5	Mushollah	2	
6	Gereja	10	
8	Pos Kamling	0	
9	Taman Kanak – kanak	1	
10	Pos Polisi	-	
11	SD Negeri	2	
12	SMP Swasta	-	
13	Balai Pertemuan Dusun	-	
14	Madrasah Diniyah Awaliyah	-	
15	Cek Dam	-	
16	Tempat Pemakaman Umum	1	Wakap Muslim
17	Pemancar RRI		
18	Sungai	2	
19	Jalan Tanah	8	
20	Jalan Koral	2	
21	Sungai Bor	16	

BAB III
MASALAH DAN POTENSI

3.1. POTENSI DESA PERPANDEN

Berdasarkan Musyawarah dan Penjaringan Potensi yang dilakukan setiap Dusun dalam proses Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) dalam Pendampingan Desa di Desa Perpanden, Didapati Potensi Desa sebagai berikut :

3.1.1 POTENSI URUSAN WAJIB

NO	BIDANG	POTENSI	LOKASI
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Guru SD • Penyediaan gedung Musolah, uks • Rahab Ruang Kelas • Ada Gedung Taman Kanak – kanak (TK) 	
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan/fasilitas untuk posyandu balita/lansia dan bumil • Alat-alat Kesehatan • Plank Posyandu • Program keluarga Berencana • Adanya papan Himbuan untuk KB • Adanya MCK 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa • Desa • Desa • Desa • Semua Dusun • Desa • DEsa
3	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Jalan Desa Penghubung Antar Dusun • Adanya Jalan Usaha Tani • Adanya Balai Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Dusun • Semua Dusun • Semua Dusun
4	Lingkungan Hidup		
5	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Pos Ronda • Adanya Lapangan Bola Voli • Adanya Kegiatan Karang Taruna • Adanya Tempat Pemakaman Umum • Adanya Kegiatan Ibu – ibu PKK 	<ul style="list-style-type: none"> •
6	Koperasi dan Usaha Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terbnetuk nya BUMDES • Adanya Masyarakat yang memelihara hewan ternak berupa 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa • Desa

	berupa Menjahit	
Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Aparatur Desa Lengkap • Struktur BPD Lengkap • Sarana Kantor Desa berupa perlengkapan kursi, lemari, computer, pengeras suara • Balai Desa Lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa • Desa • Kantor Desa • Desa

3.1.2 POTENSI URUSAN PILIHAN

NO	BIDANG	POTENSI	LOKASI
1	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Persawahan • Adanya Kebun Karet • Adanya Kebun Sawit • Adanya Masyarakat bertani Palawija dan Holtikultura 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Dusun • Semua Dusun • Semua Dusun • Semua Dusun
2	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Cek Dam (dalam Bentuk danau Buatan) • Adanya Sumur Mata Air 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa • Desa

3.2 MASALAH DESA PERPANDEN

Pengertian masalah yang dilakukan disetiap dusun dalam proses Menggagas Masa Depan Desa (MDD) dalam Pendampingan Desa didapati sebagai berikut :

3.2.1. MASALAH URUSAN WAJIB

NO	BIDANG	MASALAH	LOKASI
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya anak putus sekolah pendidikan 9 tahun • Jarak gedung sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang jauh dari desa • Kurang lancarnya transportasi sehingga biaya menjadi tinggi • Tingginya minat baca tetapi tidak adanya saran perpustakaan Desa • Lemahnya pengetahuan anak didik SMP terhadap Komputer • Kurangnya Guru PNS di sekolah dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Dusun • Desa • Desa • Desa • Desa • Desa
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya masyarakat yang tidak memiliki MCK • Pada musim kemarau sulit mendapatkan air bersih • Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki Kartu Jaminan 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Dusun • - • Semua Dusun